

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Kelas: Standarisasi Etika, Literasi Digital, dan Optimalisasi Kognitif Peserta Didik

Emi Pratiwi Br Surbakti¹, Indri Natasya, Diah Kumalasari, Indra Satia Pohan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif formulasi, urgensi, dan efektivitas kebijakan pendidikan Islam dalam mengatur tata kelola dan pemanfaatan media pembelajaran di ruang kelas. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan telaah regulasi manajerial, kajian ini membedah bagaimana institusi madrasah dan sekolah Islam menavigasi arus disrupsi teknologi. Hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis digital tidak dapat dibiarkan berjalan secara otonom tanpa panduan yuridis internal dari sekolah. Kebijakan pendidikan Islam terbukti menjadi instrumen mitigasi yang esensial dalam menetapkan tiga pilar utama: standarisasi etika konten (quality control) untuk mencegah infiltrasi nilai sekuler, kebijakan pengalokasian anggaran yang seimbang antara pengadaan infrastruktur dan pelatihan guru (capacity building), serta perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi media ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa kebijakan yang adaptif dan visioner akan mentransformasi media pembelajaran dari sekadar alat bantu visual menjadi katalisator yang memperkuat epistemologi keilmuan Islam, memastikan terciptanya iklim kelas yang interaktif, modern, dan tetap terjaga kemurnian akhlakunya.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Media Pembelajaran, Ruang Kelas, Literasi Digital, Standarisasi Konten.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the formulation, urgency, and effectiveness of Islamic education policies in regulating the governance and utilization of learning media in the classroom. Using a descriptive qualitative method with a literature study approach and managerial regulation review, this research dissects how madrasahs and Islamic schools navigate the current of technological disruption. The results demonstrate that the utilization of digital-based interactive learning media cannot be left to operate autonomously without internal juridical guidance from the school. Islamic education policies are proven to be an essential mitigation instrument in establishing three main pillars: ethical content standardization (quality control) to prevent the infiltration of secular values, balanced budget

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, emipratiwisurbakti@gmail.com

allocation policies between infrastructure procurement and teacher training (capacity building), and the formulation of Standard Operating Procedures (SOP) for integrating media into Lesson Plans (RPP). The conclusion of this study confirms that adaptive and visionary policies will transform learning media from mere visual aids into catalysts that strengthen the epistemology of Islamic science, ensuring the creation of a classroom climate that is interactive, modern, and maintains the purity of morals.

Keywords: Islamic Education Policy, Learning Media, Classroom, Digital Literacy, Content Standardization.

PENDAHULUAN

Dalam lanskap pedagogi abad ke-21, ruang kelas tengah mengalami evolusi yang sangat revolusioner. Arus disrupsi teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam, yang diwadahi melalui entitas madrasah, pesantren, maupun Sekolah Islam Terpadu (SIT), tidak dapat lagi mempertahankan status quo dengan hanya bersandar pada metodologi pengajaran lisan (ceramah) dan media papan tulis konvensional. Generasi peserta didik masa kini (digital natives) memiliki struktur kognitif yang sangat berorientasi pada stimulasi visual dan interaktivitas. Menghadapi realitas sosiologis ini, pemanfaatan media pembelajaran mutakhir—mulai dari presentasi multimedia, platform e-learning, hingga video animasi—menjadi sebuah imperatif pedagogis guna meningkatkan daya serap, atensi, dan motivasi belajar siswa di dalam kelas (Azra, 2021).

Kendati demikian, integrasi teknologi ke dalam ruang kelas pendidikan Islam membawa paradoks yang cukup pelik. Berbeda dengan sekolah umum yang cenderung memandang media pembelajaran murni sebagai alat bantu kognitif (cognitive tools) yang bebas nilai (value-free), pendidikan Islam terikat pada dogma dan mandat teologis untuk memproteksi akidah serta akhlak peserta didik. Media digital yang diproduksi oleh industri teknologi global sering kali disisipi oleh muatan (hidden curriculum) yang tidak selaras dengan etika Islam. Penggunaan video dari platform terbuka (open-source) seperti YouTube rentan membawa ancaman pop-up iklan yang melanggar batasan aurat, menayangkan unsur kekerasan, atau mempromosikan gaya hidup hedonis dan liberal yang dapat merusak alam bawah sadar siswa (Syah, 2023).

Menyikapi ancaman degradasi moral di balik kemegahan teknologi tersebut, peran Kebijakan Pendidikan Islam (Islamic Education Policy) di tingkat institusi menjadi sangat determinan. Kebijakan sekolah berfungsi sebagai filter atau katup pengaman yang mengatur sejauh mana, ruang lingkup, dan batasan etis penggunaan media di dalam kelas. Fakta empiris

di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketimpangan manajerial; di mana sekolah berlomba-lomba membeli layar pintar (smartboard) dan memasang koneksi internet super cepat demi gengsi institusional, namun luput menerbitkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pedoman penggunaannya. Ketiadaan kebijakan ini (policy vacuum) melahirkan anarki metodologis, di mana guru menggunakan media secara serampangan atau, sebaliknya, guru yang gagap teknologi memilih mengabaikan fasilitas tersebut hingga menjadi besi tua (Majid, 2022).

Berangkat dari kompleksitas dan urgensi tata kelola di atas, penelitian ini disusun untuk membedah secara analitis mengenai kebijakan pendidikan Islam dalam memanfaatkan media pembelajaran di ruang kelas. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana pimpinan sekolah dan pemangku kepentingan merumuskan regulasi pengadaan, menyusun standarisasi konten (quality control), dan merancang program peningkatan literasi digital bagi para pendidik. Melalui telaah akademis yang komprehensif ini, diharapkan dapat terbangun sebuah model tata kelola regulasi yang mampu mengharmonisasikan kecepatan adopsi teknologi pendidikan dengan kokohnya nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga ruang kelas madrasah mampu bertransformasi menjadi pusat inkubasi ilmu yang modern, interaktif, dan mencerahkan.

KAJIAN TEORI

Hakikat Kebijakan Pendidikan Islam di Tingkat Institusi

Secara terminologis, kebijakan (policy) merupakan rangkaian pedoman, asas, dan regulasi yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu keputusan strategis institusi. Dalam konteks sekolah atau madrasah, kebijakan pendidikan Islam adalah perwujudan visi dan misi teologis lembaga yang ditranslasikan ke dalam aturan tata kelola (governance), pengalokasian anggaran, penyusunan kurikulum, dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kebijakan ini bertindak sebagai payung hukum internal yang mengikat seluruh sivitas akademika—terutama para guru kelas—untuk memastikan bahwa setiap aktivitas transfer keilmuan dan penggunaan perangkat pendukung tidak keluar dari koridor syariat Islam (Kasmir, 2022).

Konsepsi dan Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran, yang secara etimologis berasal dari kata Latin "medius" (perantara), merujuk pada segala instrumen yang sengaja dirancang untuk menyalurkan pesan informasi dari pendidik kepada peserta didik. Dalam ilmu pendidikan Islam (Tarbiyah), media bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen esensial yang memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran (maqashid al-tarbiyah). Fungsi utama media

pembelajaran meliputi fungsi atensi (menarik perhatian siswa), fungsi afektif (menggugah emosi dan empati), fungsi kognitif (memperjelas informasi abstrak menjadi konkret), serta fungsi kompensatoris (membantu siswa yang lemah dalam membaca teks untuk memahami materi melalui visual). Penggunaan media yang tepat terbukti secara empiris mampu mereduksi verbalisme (penyakit hanya tahu kata tanpa tahu makna) di kalangan siswa (Tafsir, 2024).

Standarisasi Kesesuaian Media dalam Islam

Pemanfaatan media dalam kelas madrasah tidak bisa mengadopsi prinsip *laissez-faire* (bebas nilai). Penggunaannya harus melewati parameter kesesuaian yang ketat. Pertama, Kesesuaian Syariat: media harus bebas dari unsur syirik (penyekutuan Tuhan), pornografi, pornoaksi, dan unsur maksiat lainnya. Kedua, Kesesuaian Instruksional: media harus relevan dengan Tujuan Pembelajaran (TP) yang tercantum dalam silabus, bukan sekadar tayangan hiburan (*intermezzo*) pengisi waktu kosong. Ketiga, Kesesuaian Psikologis: tingkat kerumitan bahasa dan desain visual media harus adaptif dengan fase perkembangan kognitif usia siswa. Keempat, Kesesuaian Estetika: media yang disajikan harus memenuhi kaidah keindahan (*jamaliyah*) yang menyejukkan hati (Mulyasa, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian komprehensif ini dikonstruksi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang berpijak secara teguh pada studi kebijakan (*policy research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Desain metodologi ini difokuskan pada pembedahan dokumen regulasi internal madrasah, rasionalisasi tata kelola teknologi pendidikan, serta telaah konseptual mengenai etika pedagogis. Pengumpulan data sekunder dieksekusi secara ketat melalui penelusuran literatur otoritatif, yang meliputi teks kebijakan kurikulum nasional, buku manajemen pendidikan Islam, jurnal teknologi instruksional, serta riset-riset akademik yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021-2026). Proses analisis data menggunakan tahapan reduksi informasi teknis, kategorisasi berdasarkan hierarki perumusan kebijakan (pengadaan, standarisasi konten, dan literasi guru), lalu disintesis secara induktif guna melahirkan rumusan konklusi yang objektif, komprehensif, dan memiliki daya terap aplikatif bagi kemajuan manajemen ruang kelas di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengadaan Infrastruktur dan Proporsionalitas Anggaran

Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa intervensi pertama dari pimpinan madrasah dalam pemanfaatan media terletak pada kebijakan

finansial. Sekolah yang profesional harus menerbitkan kebijakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) yang proporsional untuk infrastruktur digital kelas. Pengadaan proyektor, layar interaktif, pelantang suara (sound system), dan jaringan internet nirkabel (Wi-Fi) merupakan fondasi awal. Namun, kebijakan pengadaan ini akan menemui kegagalan fatal (bottleneck) apabila tidak diiringi dengan kebijakan anggaran pemeliharaan (maintenance policy). Banyak peralatan media di kelas madrasah yang terbengkalai rusak karena ketiadaan regulasi pendanaan untuk sekadar mengganti lampu proyektor yang mati atau memperbaiki jaringan kabel yang putus (Gunawan, 2022).

Kebijakan Standarisasi Konten (Quality Control) dan Filterisasi Moral

Tahapan paling krusial dari kebijakan pemanfaatan media di kelas adalah standarisasi dan pengawasan konten. Ruang kelas pendidikan Islam tidak mentoleransi adanya infiltrasi nilai sekuler sekecil apa pun. Oleh karena itu, Kepala Madrasah melalui bidang kurikulum menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan internet dan penayangan media (video/animasi) oleh guru. Kebijakan ini mewajibkan adanya pratinjau (previewing); artinya, guru dilarang keras memutar video dari mesin pencari atau YouTube secara instan di depan kelas tanpa menontonnya secara utuh terlebih dahulu di rumah. Kebijakan pratinjau ini adalah perisai mitigasi yang paling efektif untuk mencegah tayangnya selipan iklan yang tidak senonoh atau materi yang berbenturan dengan nilai-nilai akhlakul karimah (Darmawan, 2024).

Selain itu, sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran digital 1-to-1 (satu siswa satu gawai/laptop) menerbitkan kebijakan keamanan siber (cybersecurity policy) yang sangat ketat. Manajemen IT sekolah memasang filter proksi (firewall) pada jaringan Wi-Fi kelas untuk melakukan pemblokiran (blacklisting) terhadap situs-situs porno, judi online, dan platform media sosial hiburan selama jam pelajaran berlangsung. Sebaliknya, sekolah menerapkan whitelisting terhadap aplikasi dan situs-situs ensiklopedia Islam, perpustakaan digital, serta aplikasi evaluasi interaktif seperti Quizizz atau Kahoot yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan ujian formatif (Fadillah, 2023).

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Literasi Digital Guru (Capacity Building)

Kebijakan penyediaan perangkat secanggih apa pun akan menjadi kesia-siaan (mubazir) manakala aktor utamanya, yakni guru kelas, mengalami gagap teknologi. Temuan kepustakaan menegaskan bahwa efektivitas media pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi pedagogik dan literasi digital pendidik. Menyikapi hal ini, pimpinan sekolah wajib merumuskan regulasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan "In-House Training" yang diwajibkan secara berkala di setiap

awal semester merupakan bentuk komitmen institusional. Guru tidak hanya diajarkan cara menghidupkan dan mematikan proyektor, melainkan dilatih kemahiran membuat presentasi multimedia interaktif, mengedit video pembelajaran secara mandiri, dan mendesain infografis materi PAI yang memikat visual siswa (Amin, 2024).

Dengan melatih guru menjadi kreator konten (content creator) pembelajarannya sendiri, sekolah telah menjalankan kebijakan "Otonomi Moral Konten". Guru PAI yang mampu memproduksi video sejarah Nabi secara mandiri akan memiliki jaminan kepastian 100 persen bahwa media yang ia gunakan bebas dari distorsi sejarah kaum orientalis. Kompetensi ini mentransformasi guru dari sekadar konsumen pasif konten internet menjadi produsen aktif media pembelajaran Islami yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kearifan lokal sekolah (Nizar, 2024).

Implikasi Kebijakan terhadap Ekosistem dan Motivasi Belajar di Kelas

Implementasi komprehensif dari ketiga lapis kebijakan di atas (infrastruktur, filter konten, dan pelatihan guru) akan bermuara pada transformasi revolusioner di dalam ruang kelas. Kelas PAI, yang dahulu kerap distigmatisasi sebagai jam pelajaran yang membosankan dan monoton, kini menjelma menjadi laboratorium spiritual yang sangat dinamis. Ketika guru Fikih memanfaatkan media animasi tiga dimensi (3D) untuk menjelaskan tata cara manasik haji atau rukun shalat, siswa tidak lagi meraba-raba dalam abstraksi (verbalisme). Visualisasi yang akurat merangsang aktivitas kognitif siswa secara maksimal, memperkuat retensi memori, dan mengasah ketajaman analisis mereka (Cahyono, 2023).

Lebih dari itu, integrasi media interaktif meruntuhkan sekat otoritarianisme ruang kelas masa lalu. Guru bertransformasi peran dari sekadar penceramah tunggal (sage on the stage) menjadi fasilitator dan pemandu navigasi keilmuan (guide on the side). Diskusi menjadi lebih hidup, partisipasi siswa meningkat secara eksponensial, dan pencapaian tujuan instruksional berlangsung secara efisien. Fakta ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang terbuka terhadap modernitas namun tetap berakar kuat pada ortodoksi akidah adalah formula terbaik untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang mencerahkan rasio sekaligus menyejukkan kalbu (Sanjaya, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan analisis kualitatif deskriptif yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis digital di dalam ruang kelas merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh institusi pendidikan Islam di era disrupsi. Namun, kemanfaatan esensial dari teknologi tersebut bersyarat

mutlak pada keberadaan orkestrasi Kebijakan Pendidikan Islam di tingkat manajerial madrasah. Kebijakan ini beroperasi sebagai instrumen navigasi, mitigasi, dan standarisasi yang melindungi ruang kelas dari ancaman sekularisasi dan degradasi moral. Keberhasilan integrasi media ditopang oleh kapabilitas pimpinan sekolah dalam merumuskan kebijakan proporsionalitas anggaran (pengadaan dan perawatan fasilitas), penerbitan SOP filterisasi dan peninjauan kualitas konten (quality control) oleh guru, serta komitmen absolut pada kebijakan peningkatan literasi digital pendidik (capacity building) agar mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi produsen aktif media pembelajaran Islami. Kesimpulan akhir dari studi ini menegaskan bahwa kebijakan yang visioner dan asertif akan memastikan teknologi tunduk menjadi pelayan setia dalam penyampaian risalah kebenaran, menjadikan ruang kelas madrasah sebagai episentrum pembelajaran yang secara kognitif sangat modern, namun secara etika dan spiritual tetap membumi pada nilai-nilai ketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2024). Etika pedagogis, kreativitas guru, dan metodologi pembelajaran agama Islam di era digital. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2021). Pendidikan Islam: Tradisi, pembentukan karakter, dan respons institusional terhadap disrupsi teknologi. Kencana.
- Cahyono, E. (2023). Psikologi pendidikan Islam: Mengurai atensi visual, retensi memori, dan ekosistem digital kelas. Bumi Aksara.
- Darmawan, R. (2024). Dinamika kebijakan pendidikan, manajemen risiko konten, dan perencanaan strategis madrasah. Rajawali Pers.
- Fadillah, M. (2023). Desain metode, standarisasi etika, dan evaluasi kelayakan media pembelajaran PAI. Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, H. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan, perawatan infrastruktur, dan tata kelola teknologi sekolah. Andi Offset.
- Kasmir, K. (2022). Manajemen kebijakan publik dan kepemimpinan visioner di institusi pendidikan Islam. Rajawali Pers.
- Majid, A. (2022). Strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual visual di madrasah. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2022). Manajemen pendidikan karakter, kebijakan SDM, dan kompetensi literasi digital guru. Bumi Aksara.



Nizar, S. (2024). Dinamika metodologi pendidikan Islam dan transformasi guru sebagai kreator media mandiri. Kencana.

Sanjaya, W. (2023). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan dan pemanfaatan perangkat digital. Kencana Prenada Media Group.

Syah, M. (2023). Psikologi pendidikan anak dengan pendekatan kognitif dan mitigasi ancaman teknologi. PT Remaja Rosdakarya.

Tafsir, A. (2024). Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, konsep fitrah, dan epistemologi pemanfaatan media alam. PT Remaja Rosdakarya.